



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1993 /PR.00.01/04/2012
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Rencana Kerja (Renja) K/L
Mahkamah Konstitusi TA.2013

13 April 2012

Yth. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas
Di

Jakarta

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 0096/M.PPN/03/2012 dan Nomor: S-214/MK.02/03/2012 Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mendapatkan alokasi anggaran Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 221.783.300.000,-.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja (Renja) Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2013.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Janedjri M. Gaffar
NIP 19631025 198802 1 001

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas;
4. Direktur Hukum dan HAM Bappenas;

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI								18.316,1
33365	Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum								1.948,9
	01 Terselenggaranya Manajemen Administrasi Perkara Konstitusi								1.948,9
	001 Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis	KL	0	4	4	4	4	4	548,9
	001 • Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	548,9
	002 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial	KL	0	6	6	6	6	6	1.400,0
	002 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial			6,0	6,0	6,0	6,0	1.935,4	1.400,0
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi								3.687,7
	01 Terselenggaranya Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan, dan Pengelolaan Teknologi Informasi								3.687,7
	002 Jumlah Sistem dan Informasi Penanganan Perkara	KL	0	2	2	2	2	2	3.687,7
	002 Sistem dan Informasi Penanganan Perkara			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3.687,7
3367	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan								1.508,0
	01 Terselenggaranya Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan								1.508,0
	001 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Penanganan Perkara	KL	0	1	1	1	1	1	1.508,0
	001 Dokumen Anggaran Penanganan Perkara			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.508,0
3368	Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan								6.500,0
	01 Terselenggaranya Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan, dan Pengelolaan Perpustakaan								6.500,0
	001 Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara	KL	0	8	8	8	10	10	6.500,0
	001 Kajian dan Penelitian Perkara			8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	4.700,0
	002 Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1.800,0
3369	Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan								4.671,5
	01 Terlaksananya Manajemen SDM, Arsip, dan Pengelolaan Kerumahtanggaan								4.671,5
	001 Jumlah Kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi	KL	0	5	5	5	5	5	4.671,5
	001 Kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4.671,5
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi								80.398,3
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PIPU Legislatif, PIPres, Pilgub, Pilpup, Walikota, dan Perkara Lainnya								80.398,3
	01 Terwujudnya Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel								80.398,3

V. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		001 Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus	B	01	85	80	80	80	80.398,3
		001 Perkara Puu, Skin, dan Perkara Lainnya yang Diputus			75,0	80,0	103,0	103,0	27.335,4
		002 Perkara Pilkada yang Diputus			138,0	25,0	131,0	131,0	53.062,9
07	Program Kesadaran Berkonstitusi								22.431,6
3373	Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK								22.431,6
	01 Terlaksananya Kegiatan Kesadaran Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi Konstitusi dan MK								22.431,6
		001 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK	B	08	34	34	34	34	8.000,0
		001 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara Mk			34,0	34,0	34,0	34,0	8.000,0
		002 Jumlah Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	B	08	114	114	114	114	14.431,6
		002 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan Mk			114,0	114,0	114,0	114,0	14.431,6



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (R-KLJJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI UNIT ORGANISASI)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
1	Makamah Konstitusi RI	277.432,8	221.787,3	0,0	0,0	221.787,3	248.865,2	278.342,9	276.407,5



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (R.K.JA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI PROGRAM)

INTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	109.717,0	98.557,4	0,0	0,0	98.557,4	120.874,1	126.885,6	124.950,2
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	64.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8
5	Program Penanganan Perkara Konstitusi	59.999,5	80.398,3	0,0	0,0	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4
7	Program Kesadaran Berkonstitusi	43.716,3	22.431,6	0,0	0,0	22.431,6	48.473,1	51.042,1	51.042,1



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (R.L.KJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI PROVINSI)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
D Pusat		277.432,8	221.787,3	0,0	0,0	221.787,3	248.865,2	278.342,9	276.407,5



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (R.K.KA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
0	PUSAT	277.432,8	221.787,3	0,0	0,0	221.787,3	248.865,2	278.342,9	276.407,5
00	Pusat	277.432,8	221.787,3	0,0	0,0	221.787,3	248.865,2	278.342,9	276.407,5



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (R.K.KA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2013

(REKAPITULASI KEGIATAN PER PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	109.717,0	98.557,4	0,0	0,0	98.557,4	120.874,1	126.885,6	124.950,2
65	Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum	2.018,9	1.948,9	0,0	0,0	1.948,9	2.238,6	2.357,2	421,8
66	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolanan dan Pengelolaan Teknologi Informasi	33.547,3	18.459,5	0,0	0,0	18.459,5	37.197,4	39.169,0	39.169,0
67	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan	29.424,6	26.500,7	0,0	0,0	26.500,7	31.845,2	33.138,0	33.138,0
68	Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	7.561,6	6.500,0	0,0	0,0	6.500,0	8.384,3	8.828,7	8.828,7
69	Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan	37.164,6	45.148,3	0,0	0,0	45.148,3	41.208,6	43.392,7	43.392,7
70	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	64.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8
71	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	54.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	10.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8
73	Program Penanganan Perkara Konstitusi	59.999,5	80.398,3	0,0	0,0	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4
74	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Walikota, dan Perkara Lainnya	59.999,5	80.398,3	0,0	0,0	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4
75	Program Kesadaran Berkonstitusi	43.716,3	22.431,6	0,0	0,0	22.431,6	48.473,1	51.042,1	51.042,1
76	Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK	43.716,3	22.431,6	0,0	0,0	22.431,6	48.473,1	51.042,1	51.042,1



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2. Nama Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi Ri

3. Misi Unit Organisasi :

01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya
02	Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

4. Sasaran Strategis :

01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern dan Terpercaya
02	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya
03	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan
04	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas
05	Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan
06	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
07	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional

5. Kode Program : 077.01.01

6. Nama Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2012	Usulan Tahun 2013	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1. Rupiah		98.557,4			
a. Pendamping		0,0			
b. Non Pendamping		98.557,4			
2. PHLN atau PDN		0,0			
JUMLAH	109.717,0	98.557,4	120.874,1	126.885,6	124.950,2

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

01 Meningkatkan Dukungan Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial Yang Modern dan Terpercaya	01 Indeks Pelayanan Administrasi Yustisial 02 Indeks Persepsi Publik dan Media 03 Jumlah Kegiatan Kerjasama Lembaga 04 Predikat Opini Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja 05 Persentase Perkara Yang Dikaji 06 Indeks Pelayanan Administrasi Umum
--	---

KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
DIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum	01. Terselenggaranya Manajemen Administrasi Perkara Konstitusi								Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
		001 Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis	4	4	4	4	Peraturan	KL		
		002 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial	6	6	6	6	Kegiatan	KL		
7	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi	01. Terselenggaranya Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan, dan Pengelolaan Teknologi Informasi								Biro Humas dan Protokol
		001 Jumlah bahan Publikasi Konstitusi dan MK	21	21	21	21	Judul	0	-	
		002 Jumlah Sistem dan Informasi Penanganan Perkara	2	2	2	2	Paket	KL		
		003 Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	2	2	2	2	Paket	0	-	
		004 Jumlah Kegiatan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	4	4	4	4	Paket	0	-	
7	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan	01. Terselenggaranya Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan								Biro Perencanaan dan Keuangan
		001 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Penanganan Perkara	1	1	1	1	Paket	KL		
		002 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	6	6	6	6	Paket	0	-	
8	Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	01. Terselenggaranya Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan, dan Pengelolaan Perpustakaan								Pusat Penelitian dan Pengkajian
		001 Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara	8	8	10	10	Kegiatan	KL		
		002 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	2	2	2	2	Kegiatan	KL		
9	Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan	01. Terlaksananya Manajemen SDM, Arsip, dan Pengelolaan Kerumahtanggaan								Biro Umum
		001 Jumlah Kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi	5	5	5	5	Kegiatan	KL		
		002 Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	3	3	3	3	Kegiatan	0	-	
		003 Jumlah Kegiatan Kearsipan	3	3	3	3	Paket	0	-	

UMBER PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(Juta Rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum		2.018,9	1.948,9	0,0	0,0	1.948,9	2.238,6	2.357,2	421,8	
01	Terselenggaranya Manajemen Administrasi Perkara Konstitusi		2.018,9	1.948,9	0,0	0,0	1.948,9	2.238,6	2.357,2	421,8	
01.001	Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis		361,3	548,9	0,0	0,0	548,9	400,6	421,8	421,8	
.001	Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	OU	361,3	548,9	0,0	0,0	548,9	400,6	421,8	421,8	
01.002	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial		1.657,6	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0	1.838,0	1.935,4	421,8	Pusat
.002	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial	OU	1.657,6	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0	1.838,0	1.935,4	0,0	
01	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi		33.547,3	18.459,5	0,0	0,0	18.459,5	37.197,4	39.169,0	39.169,0	
01.001	Jumlah bahan Publikasi Konstitusi dan MK		4.190,4	4.586,9	0,0	0,0	4.586,9	4.646,3	4.892,6	4.892,6	
.001	Publikasi Konstitusi dan Mk	OU	4.190,4	4.586,9	0,0	0,0	4.586,9	4.646,3	4.892,6	4.892,6	
01.002	Jumlah Sistem dan Informasi Penanganan Perkara		11.215,7	3.687,7	0,0	0,0	3.687,7	12.436,0	13.095,1	13.095,1	
.002	Sistem dan Informasi Penanganan Perkara	OU	11.215,7	3.687,7	0,0	0,0	3.687,7	12.436,0	13.095,1	13.095,1	
01.003	Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan		1.615,3	1.119,2	0,0	0,0	1.119,2	1.791,0	1.886,0	1.886,0	
.003	Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	OU	1.615,3	1.119,2	0,0	0,0	1.119,2	1.791,0	1.886,0	1.886,0	
01.004	Jumlah Kegiatan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri		16.525,9	9.065,7	0,0	0,0	9.065,7	18.324,1	19.295,3	19.295,3	
.004	Kegiatan Kerjasama dalam dan Luar Negeri	OU	16.525,9	9.065,7	0,0	0,0	9.065,7	18.324,1	19.295,3	19.295,3	
	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan		29.424,6	26.500,7	0,0	0,0	26.500,7	31.845,2	33.138,0	33.138,0	

AP

**KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
DIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET**

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Legenda:

Dom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang, O= Bukan Prioritas

Dom (9) : PPP= Public Private Partnership, ARG = Anggaran Responsif Gender

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(Juta Rupiah)

(11)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
01		33.138,0	33.138,0	31.845,2	26.500,7	0,0	0,0	26.500,7	29.424,6		Terselenggaranya Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan	
01.001		4.819,7	4.819,7	4.577,1	1.508,0	0,0	0,0	1.508,0	4.128,0		Penyusunan Dokumen Anggaran dan Penanganan Perkara	
.001		4.819,7	4.819,7	4.577,1	1.508,0	0,0	0,0	1.508,0	4.128,0	OU	Dokumen Anggaran Penanganan Perkara	
01.002		28.318,3	28.318,3	27.268,1	24.992,7	0,0	0,0	24.992,7	25.296,6		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	
.002		1.219,0	1.219,0	1.157,7	280,0	0,0	0,0	280,0	1.044,1	OU	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	
.994		1.219,0	1.219,0	1.157,7	280,0	0,0	0,0	280,0	1.044,1		Layanan Perkantoran	
01		27.099,3	27.099,3	26.110,4	24.712,7	0,0	0,0	24.712,7	24.252,5	OU	Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	
.01		8.828,7	8.828,7	8.384,3	6.500,0	0,0	0,0	6.500,0	7.561,6		Terselenggaranya Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	
.01.001		8.828,7	8.828,7	8.384,3	6.500,0	0,0	0,0	6.500,0	7.561,6		Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara	
.001		6.727,7	6.727,7	6.389,1	4.700,0	0,0	0,0	4.700,0	5.762,1	OU	Kajian dan Penelitian Perkara	
.002		2.101,0	2.101,0	1.995,2	1.800,0	0,0	0,0	1.800,0	1.799,5	OU	Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan	
01		43.392,7	43.392,7	41.208,6	45.148,3	0,0	0,0	45.148,3	37.164,6		Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan	
.01		43.392,7	43.392,7	41.208,6	45.148,3	0,0	0,0	45.148,3	37.164,6		Tertaksananya Manajemen SDM, Arsip, dan Pengelolaan Kerumahtanggaan	
.01.001		6.103,1	6.103,1	5.795,9	4.671,5	0,0	0,0	4.671,5	5.227,1		Jumlah Kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi	
.001		6.103,1	6.103,1	5.795,9	4.671,5	0,0	0,0	4.671,5	5.227,1	OU	Kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi	
.01.002		36.005,9	36.005,9	34.193,6	39.522,8	0,0	0,0	39.522,8	30.838,1		Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	

MBER PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(Juta Rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
.002	Kegiatan Pengelolaan Bmn dan Kerumah Tanggaan	OU	784,0	683,8	0,0	0,0	683,8	869,3	915,4	915,4	
.994	Layanan Perkantoran	OU	784,0	683,8	0,0	0,0	683,8	869,3	915,4	915,4	Pusat
			30.054,1	38.839,0	0,0	0,0	38.839,0	33.324,3	35.090,5	35.090,5	
01.003	Jumlah Kegiatan Kearsipan		30.054,1	38.839,0	0,0	0,0	38.839,0	33.324,3	35.090,5	35.090,5	Pusat
.003	Kegiatan Kearsipan	OU	1.099,4	954,0	0,0	0,0	954,0	1.219,1	1.283,7	1.283,7	
			1.099,4	954,0	0,0	0,0	954,0	1.219,1	1.283,7	1.283,7	
			1.099,4	954,0	0,0	0,0	954,0	1.219,1	1.283,7	1.283,7	Pusat

angan :

lom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

lom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

12 April 2012

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
SEKRETARIS JENDERAL



IANEDIRI M. GAFFAR

NIP : 196310251988021001



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2. Nama Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi Ri

3. Misi Unit Organisasi :

01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya
02	Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

4. Sasaran Strategis :

01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern dan Terpercaya
02	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya
03	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan
04	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas
05	Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan
06	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
07	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional

5. Kode Program : 077.01.02

6. Nama Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2012	Usulan Tahun 2013	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1. Rupiah		20.400,0			
a. Pendamping		0,0			
b. Non Pendamping		20.400,0			
2. PHLN atau PDN		0,0			
JUMLAH	64.000,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

01 Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Didukung dengan sarana dan Prasarana yang Modern	01 Rasio Peralatan, Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Kantor
--	---

**GIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET**

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana 001 Jumlah Sarana, Prasarana dan Pengembangan Gedung	1	1	1	1		0		Biro Umum
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	01 Peningkatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 001 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	1		0		Biro Umum

Angka:

08 : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
09 : PPP= Public Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

MBER PENDANAAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(Juta Rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana		54.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana		54.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.001	Jumlah Sarana, Prasarana dan Pengembangan Gedung		54.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.001	Pengembangan Gedung	OU	54.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			54.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pusat
01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung		10.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8	11.675,8
	Peningkatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8	11.675,8
01.001	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8	11.675,8
.001	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OU	10.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8	11.675,8
			10.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8	Pusat

Anggaran :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

12 April 2012

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
SEKRETARIS JENDERAL



JANEDJIRI M. GAFFAR

NIP : 196310251988021001



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 2. Nama Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi RI
 3. Misi Unit Organisasi :

01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya
02	Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

4. Sasaran Strategis :

01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern dan Terpercaya
02	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya
03	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan
04	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas
05	Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan
06	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
07	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional

5. Kode Program : 077.01.06
 6. Nama Program : Program Penanganan Perkara Konstitusi
 7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2012	Usulan Tahun 2013	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1. Rupiah		80.398,3			
a. Pendamping		0,0			
b. Non Pendamping		80.398,3			
2. PHLN atau PDN		0,0			
JUMLAH	59.999,5	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

01	Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	01	Persentase Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya
		02	Persentase Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

**KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
DIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI**

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya	01 Terwujudnya Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	73	80	80	80	Perkara	B		Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
		001 Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus		80			Perkara	B		
		002 Jumlah Perkara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wapres yang Diputus		80			Perkara	B		
		003 Jumlah Perkara Pemilukada yang Diputus	138	25	25	25	Perkara	B		

Legenda:

Item (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang, O= Bukan Prioritas

Item (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

MEMBER PENDANAAN

PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

(Juta Rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Walikota, dan Perkara Lainnya		59.999,5	80.398,3	0,0	0,0	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4	
001	Terwujudnya Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel		59.999,5	80.398,3	0,0	0,0	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4	
001.001	Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus		59.999,5	80.398,3	0,0	0,0	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4	
.001	Perkara Puu, Skin, dan Perkara Lainnya yang Diputus	OU	38.540,4	27.335,4	0,0	0,0	27.335,4	38.540,4	38.540,4	38.540,4	Pusat
.002	Perkara Pilkada yang Diputus	OU	38.540,4	27.335,4	0,0	0,0	27.335,4	38.540,4	38.540,4	38.540,4	Pusat
			21.459,1	53.062,9	0,0	0,0	53.062,9	29.889,5	50.199,0	50.199,0	
			21.459,1	53.062,9	0,0	0,0	53.062,9	29.889,5	50.199,0	50.199,0	Pusat

Angg

lom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung: Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

lom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

12 April 2012

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
SEKRETARIS JENDERAL

Janed

JANEDJRM.GAFFAR

NIP : 196310251988021001



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 2. Nama Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi RI
 3. Misi Unit Organisasi :

01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya
02	Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

4. Sasaran Strategis :

01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern dan Terpercaya
02	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya
03	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan
04	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas
05	Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan
06	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
07	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional

5. Kode Program : 077.01.07
 6. Nama Program : Program Kesadaran Berkonstitusi
 7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2012	Usulan Tahun 2013	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1. Rupiah		22.431,6			
a. Pendamping		0,0			
b. Non Pendamping		22.431,6			
2. PHLN atau PDN		0,0			
JUMLAH	43.716,3	22.431,6	48.473,1	51.042,1	51.042,1

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

01 Meningkatkan Konstusionalitas Masyarakat dan Budaya Berkonstitusi	01 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK 02 Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Konstitusi dan MK
--	--

**KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
DIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
PROGRAM KESADARAN BERKONSTITUSI**

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK	01 Terlaksananya Kegiatan Kesadaran Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi Konstitusi dan MK								Biro Humas dan Protokol
	001 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK	34	34	34	34	Kegiatan	B		
	002 Jumlah Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	114	114	114	114	Paket	B		

LEGENDA:

Item (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang, O= Bukan Prioritas

Item (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

MBER PENDANAAN

PROGRAM KESADARAN BERKONSTITUSI

(Juta Rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK		43.716,3	22.431,6	0,0	0,0	22.431,6	48.473,1	51.042,1	51.042,1	
001	Terlaksananya Kegiatan Kesadaran Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi Konstitusi dan MK		43.716,3	22.431,6	0,0	0,0	22.431,6	48.473,1	51.042,1	51.042,1	
01.001	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK		18.927,5	8.000,0	0,0	0,0	8.000,0	20.987,0	22.099,2	22.099,2	
.001	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK	OU	18.927,5	8.000,0	0,0	0,0	8.000,0	20.987,0	22.099,2	22.099,2	
01.002	Jumlah Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK		18.927,5	8.000,0	0,0	0,0	8.000,0	20.987,0	22.099,2	22.099,2	Pusat
.002	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	OU	24.788,8	14.431,6	0,0	0,0	14.431,6	27.486,1	28.942,9	28.942,9	
			24.788,8	14.431,6	0,0	0,0	14.431,6	27.486,1	28.942,9	28.942,9	Pusat

angan :

lom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

lom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

12 April 2012

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
SEKRETARIS JENDERAL

Imed

IANEDJRI M. GAFFAR

NIP : 196310251988021001

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI UNIT ESELON II)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi RI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
01	Biro Administrasi Perkara dan Persidangan	62.018,4	82.347,2	0,0	0,0	82.347,2	70.668,5	91.096,6	89.161,2
02	Biro Humas dan Protokol	77.263,6	40.891,1	0,0	0,0	40.891,1	85.670,5	90.211,1	90.211,1
03	Biro Perencanaan dan Keuangan	29.424,6	26.500,7	0,0	0,0	26.500,7	31.845,2	33.138,0	33.138,0
04	Biro Umum	101.164,6	65.548,3	0,0	0,0	65.548,3	52.296,7	55.068,5	55.068,5
05	Pusat Penelitian dan Pengkajian	7.561,6	6.500,0	0,0	0,0	6.500,0	8.384,3	8.828,7	8.828,7

Anggaran : Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Rupiah Pendamping); Kolom (5) = (PUN+PDN+Hibah); Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi RI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	109.717,0	98.557,4	0,0	0,0	98.557,4	120.874,1	126.885,6	124.950,2
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	64.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	59.999,5	80.398,3	0,0	0,0	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4
07	Program Kesadaran Berkonstitusi	43.716,3	22.431,6	0,0	0,0	22.431,6	48.473,1	51.042,1	51.042,1

Anggaran : Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Rupiah Pendamping); Kolom (5) = (PUN+PDN+Hibah); Kolom (7) = Tidak Termasuk Subsidi

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI PROVINSI)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi RI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
00	Pusat	277.432,8	221.787,3	0,0	0,0	221.787,3	248.865,2	278.342,9	276.407,5

Anggaran : Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Rp. Pendamping); Kolom (5) = (PLN+PDN+Hibah); Kolom (7) = Tidak Termasuk Subsidi

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (REKKA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi RI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
PUSAT		277.432,8	221.787,3	0,0	0,0	221.787,3	248.865,2	278.342,9	276.407,5
00 Pusat		277.432,8	221.787,3	0,0	0,0	221.787,3	248.865,2	278.342,9	276.407,5

Anggaran : Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Rupiah Pendamping); Kolom (5) = (PUN+PDN+Hibah); Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (R-KL/JA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI KEGIATAN PER PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi RI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5+6)	(8)	(9)	(10)
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	109.717,0	98.557,4	0,0	0,0	98.557,4	120.874,1	126.885,6	124.950,2
55	Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum	2.018,9	1.948,9	0,0	0,0	1.948,9	2.238,6	2.357,2	421,8
56	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi	33.547,3	18.459,5	0,0	0,0	18.459,5	37.197,4	39.169,0	39.169,0
67	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan	29.424,6	26.500,7	0,0	0,0	26.500,7	31.845,2	33.138,0	33.138,0
68	Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	7.561,6	6.500,0	0,0	0,0	6.500,0	8.384,3	8.828,7	8.828,7
69	Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan	37.164,6	45.148,3	0,0	0,0	45.148,3	41.208,6	43.392,7	43.392,7
70	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	64.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8
71	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	54.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	10.000,0	20.400,0	0,0	0,0	20.400,0	11.088,1	11.675,8	11.675,8
	Program Penanganan Perkara Konstitusi	59.999,5	80.398,3	0,0	0,0	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4
	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Walikota, dan Perkara Lainnya	59.999,5	80.398,3	0,0	0,0	80.398,3	68.429,9	88.739,4	88.739,4
	Program Kesadaran Berkonstitusi	43.716,3	22.431,6	0,0	0,0	22.431,6	48.473,1	51.042,1	51.042,1
173	Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK	43.716,3	22.431,6	0,0	0,0	22.431,6	48.473,1	51.042,1	51.042,1

Legenda : Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Rupiah Pendamping); Kolom (5) = (PLN+PDN+Hibah); Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi